



# LAPORAN KINERJA

— INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) 2022 —

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KITA JAGA ALAM  
ALAM JAGA KITA**



| [bpbd.sumsel](https://www.bpbd.sumsel.go.id) / 0711-385108

## Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP BPBD Prov. Sumsel Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Menindaklanjuti dinamika perencanaan pemerintah pusat dan daerah Prov. Sumsel Tahun 2022 serta perkembangan penanganan bencana menjadi urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sub-urusan bencana rumpun dari tantribunlinmas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang melekat pada manajemen BPBD Prov. Sumsel, Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sumsel menyampaikan pertanggungjawaban kinerja BPBD Prov. Sumsel sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Prov. Sumsel Tahun 2022.

Palembang, Februari 2023

**KEPALA PELAKSANA  
BPBD PROV. SUMSEL**



**H. Iriansyah, S.Sos, SKM, M,Kes**  
**NIP. 196310161985011001**

# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR.....   | ii  |
| DAFTAR ISI.....   | iii |
| IKTISAR EKSEKUTUF .....   | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1 Struktur Organisasi .....   | 1   |
| 1.2 Tugas dan Fungsi .....  | 3   |
| 1.3 Isu-Isu Strategis .....   | 8   |
| 1.4 Keadaan Pegawai .....   | 10  |
| 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .....  | 12  |
| 1.6 Keuangan .....  | 16  |
| 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....                             | 18  |
| BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA .....   | 19  |
| 2.1 Perencanaan Strategis .....   | 21  |
| 2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah .....   | 21  |
| 2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....   | 24  |
| 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan .....   | 25  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....   | 28  |
| 3.1 Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumsel .....                                   | 28  |
| BAB IV PENUTUP .....  | 36  |
| 4.1 Langkah-Langkah Pencapaian Target Kinerja, Dukungan dan Saran Serta Evaluasi..... | 36  |

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Prov. Sumsel Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPBD Prov. Sumsel yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BPBD Prov. Sumsel Tahun 2019-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja BPBD Prov. Sumsel yang dihasilkan di tahun 2022, Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Prov. Sumsel ke depan, sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1: Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan.**
  - Penurunan Indek Risiko Bencana Provinsi Sumsel
  - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
- b. **Sasaran 2: Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana**
  - Persentase daerah rawan bencana yang mempunyai pelayanan informasi
  - Persentase Penanganan Pra Bencana
- c. **Sasaran 3: Menurunkan Tingkat Kerentanan Bencana**
  - Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi BPBD Prov. Sumsel dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi :**

1. Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Isu Strategis
4. Keadaan Pegawai
5. Keadaan Sarana dan Prasarana
6. Keuangan
7. Sistematika LKJiP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Prov. Sumsel Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Prov. Sumsel Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD Prov. Sumsel
2. Mendorong BPBD Prov. Sumsel di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD Prov. Sumsel untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPBD Prov. Sumsel di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Struktur Organisasi**

BPBD Prov. Sumsel dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 11 Tahun 2010. BPBD Prov. Sumsel merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
  - A. Unsur Kepala: secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - B. Unsur Pengarah;

C. Unsur Pelaksana yang terdiri dari:

1. Pimpinan : Kepala Pelaksana;
2. Pembantu Pimpinan: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;
3. Teknis Pelaksana:
  - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang;
  - Unit Pelaksana Teknis;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi Unsur Pelaksana Badan terdiri dari:

A. Sekretariat yang terdiri dari:

1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum; dan
3. Subbagian Keuangan.

B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terdiri dari:

1. Kepala Seksi Pencegahan; dan
2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.

C. Bidang Penanganan Darurat yang terdiri dari:

1. Kepala Seksi Tanggap Daruratan; dan
2. Kepala Seksi Pengungsi.

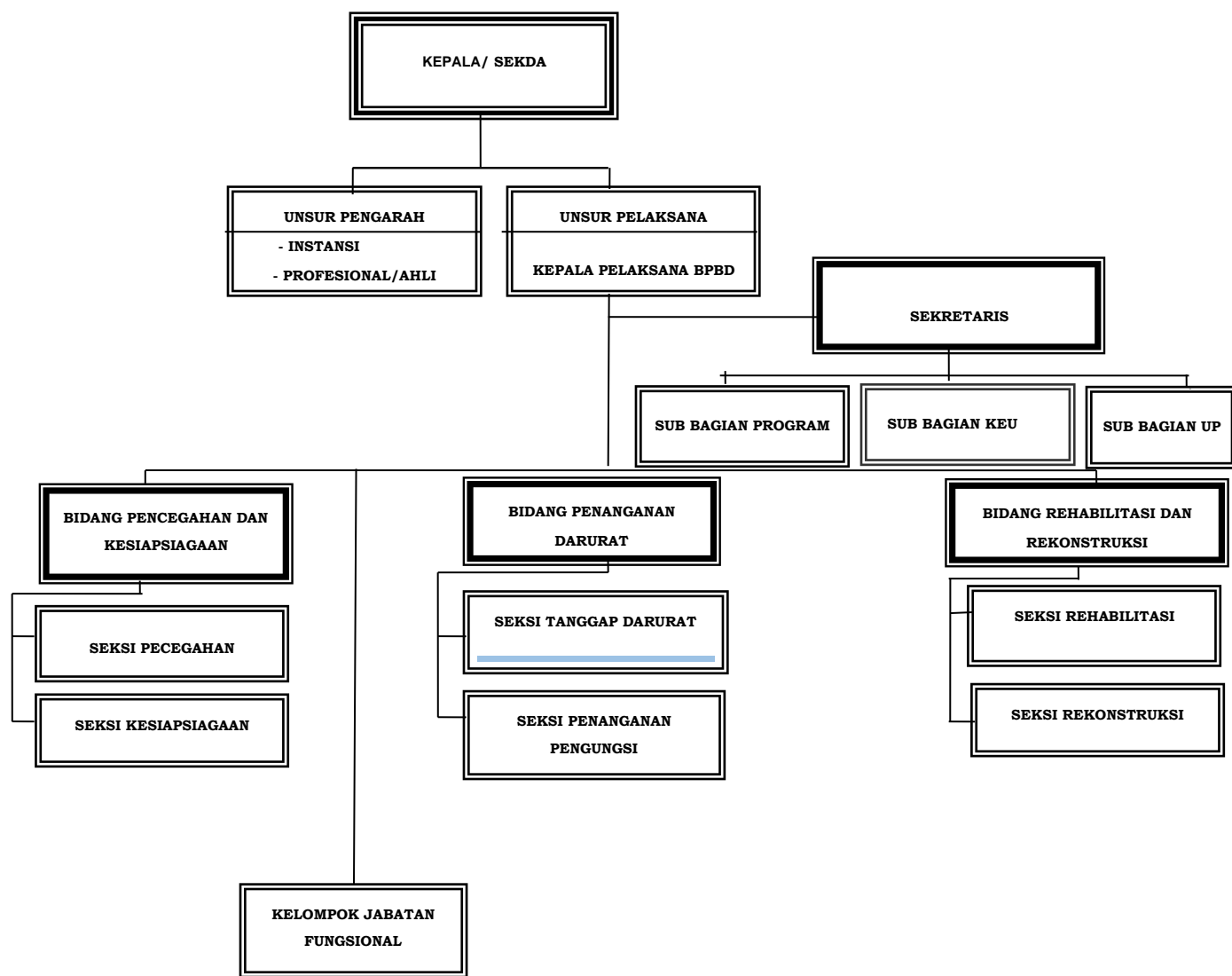
D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari:

1. Kepala Seksi Rehabilitasi; dan
2. Kepala Seksi Rekonstruksi.

E. Unit Pelaksana Badan;

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar.1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**



## 1.2 Tugas dan Fungsi

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan, Rincian Tugas Pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Unsur Pelaksana**, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- 4) Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD;
- 2) Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- 3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- 4) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- 5) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi :
  - a. Subbagian Program
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;



- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- 7) Pelaksanaan jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
  - a. Seksi Pencegahan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan

**4. Bidang Penanganan Darurat,** mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penanganan darurat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- 3) Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- 5) Memobilisasi satuan tugas reaksi cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana;
- 6) Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;

- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi :
  - a. Seksi Tanggap Darurat
  - b. Seksi Penanganan

**5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,** mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 3) Pemberian komando pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi :
  - a. Seksi Rehabilitasi
  - b. Seksi Rekonstruksi

**6. UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan,** mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pasca terjadinya bencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPTB trauma center dan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada kebijakan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Penyusunan dan pengusulan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana UPTB Pelayanan Trauma center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 3) Pengusulan penempatan personil UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) Pengesahan prosedur pelayanan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 5) Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis Trauma Center Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu layanan trauma center dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- 7) Pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala;
- 8) Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengkoordinir, memeriksa dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan.

- Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Menyiapkan dokumen prosedur pelaksanaan trauma center yang berkaitan dengan persyaratan manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 2) Pengkajian ulang instruksi kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan manajemen pada UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 3) Pertanggungjawaban terhadap pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pada Trauma center dan Pelayanan Kesehatan serta dokumen terkait;
- 4) Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas personalia, keuangan, dokumentasi dan informasi;
- 5) Pertanggungjawaban terhadap surat-menyurat yang dilakukan oleh Kepala UPTB;
- 6) Pemberian delegasi kepada subordinatnya apabila berhalangan ;
- 7) Pelaporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Unit Pelaksanaan

Teknis Badan;

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

1) Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Pelaksana Badan atas usul Kepala UPTB dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Badan;

3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi BPBD Prov. Sumsel, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana pada tiap tahapan sesuai *circle* penanggulangan bencana.

b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;

d. Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;

- e. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
  - f. Menyusun masterplan pengurangan risiko bencana asap dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik Prov. Sumsel.
2. Bidang Penanganan Darurat
- a. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
  - b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
  - c. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
  - d. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (*on call*) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
  - e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
  - f. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
  - g. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

- b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.

## 1.4 Keadaan Pegawai

### 1.4.1. PNS dan NON PNS

Sumber daya merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh organisasi, dalam mengelola sumber daya yang baik akan meningkatkan kesejahteraan, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, memiliki sumberdaya manusia sebanyak 65 orang ASN, 105 TKS dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kualifikasi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin**  
**Per 1 Januari 2023**

| No. | Uraian  | Jumlah      |    |
|-----|---|-------------|----|
| 1.  | Jabatan Struktural  | Esselon II  | 1  |
|     |   | Esselon III | 5  |
|     |   | Esselon IV  | 10 |
| 2   | Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan                                 | Esselon II  | 1  |
|     |   | Esselon III | 5  |
|     |   | Esselon IV  | 10 |
|     | Pejabat yang belum memenuhi persyaratan kepangkatan                                 | Esselon II  | 0  |
|     |   | Esselon III | 0  |
|     |   | Esselon IV  | 0  |
| 3   | Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural | Esselon II  | 0  |
|     |   | Esselon III | 4  |
|     |   | Esselon IV  | 3  |
|     | Pejabat Struktural yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural | Esselon II  | 1  |
|     |   | Esselon III | 1  |
|     |   | Esselon IV  | 7  |
| 4   | Jabatan Fungsional  | Kesehatan   | 25 |

|        |                  |                         |     |
|--------|------------------|-------------------------|-----|
| 5      | Staf             |                         | 24  |
| 6      | Usia             | Usia diatas 30-40 Tahun | 11  |
|        |                  | Usia diatas 41-50 Tahun | 31  |
|        |                  | Usia diatas 50 Tahun    | 23  |
| 7      | Pendidikan       | Strata 2                | 17  |
|        |                  | Strata 1                | 31  |
|        |                  | Sarjana Muda            | 7   |
|        |                  | SMA                     | 6   |
|        |                  | SMP                     | 1   |
| 8      | Jenis Kelamin    | SD                      | 0   |
|        |                  | Laki-laki               | 23  |
| 9      | Golongan / Ruang | Perempuan               | 42  |
|        |                  | Golongan VI             | 17  |
|        |                  | Golongan III            | 43  |
|        |                  | Golongan II             | 5   |
| 10     | SDM Keseluruhan  | Golongan I              | 0   |
|        |                  | PNS                     | 65  |
|        |                  | TKS                     | 105 |
| Jumlah |                  |                         | 170 |

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan) Trauma Centre dan Pelayanan Kesehatan di dukung oleh SDM kesehatan Jabatan Fungsional Tertentu sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Tenaga Kesehatan Trauma Centre dan Pelayanan Kesehatan**

| <b>FUNGSIONAL KESEHATAN</b> | <b>JUMLAH</b> |
|-----------------------------|---------------|
| Dokter Umum                 | 4             |
| Psikolog                    | 1             |
| Apoteker                    | 1             |
| Asisten Apoteker            | 1             |
| Laboratorium                | 2             |
| Dokter Gigi                 | 1             |
| Perawat Gigi                | 2             |
| Perawat                     | 7             |
| Bidan                       | 2             |
| KESMAS                      | 3             |
| Gizi                        | 4             |
| <b>JUMLAH</b>               | <b>28</b>     |

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan selain memiliki SDM juga memiliki sumber daya berupa logistik dan peralatan bencana dilengkapi gudang logistik dan gudang peralatan serta untuk mendukung pelayanan kebencanaan sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan yang berada didekat Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menjadikan keuntungan tersendiri dalam pengorganisasian Penanggulangan Bencana.

### 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Persediaan sarana dan prasarana berupa logistik yang tersimpan di gudang logistik BPBD Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Dukungan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Provinsi Sumatera Selatan Maret 2023**

| No | Jenis/ Nama Barang          | Stok |      |      | Total | Satuan | Ket |
|----|-----------------------------|------|------|------|-------|--------|-----|
|    |                             | 2020 | 2021 | 2022 |       |        |     |
| 1  | Peralatan Dapur Keluarga    | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 2  | Sandang                     | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 3  | Famili kits                 | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 4  | Selimut                     | -    | -    | 86   | 86    | Lembar |     |
| 6  | Kompor Serba Guna Bio Massa | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 7  | Kelambu                     | -    | -    | -    | 0     | Lembar |     |
| 8  | Kantong Mayat               | -    | -    | -    | 28    | Lembar |     |
| 9  | Paket Kesehatan Keluarga    | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 10 | Kids Ware                   | -    | -    | 75   | 30    | Paket  |     |
| 11 | Paket Seragam Laki-Laki     | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 12 | Paket Seragam Perempuan     | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 13 | Karung Plastik              | -    | -    | -    | 0     | Lembar |     |
| 14 | Tenda Gulung                | -    | -    | -    | 0     | Lembar |     |
| 16 | Masker                      | -    | -    | 1000 | 1000  | Lembar |     |
| 17 | Perlengkapan Sekolah        | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 18 | Perlengkapan Makan          | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 19 | Paket Rekreasi              | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 20 | Lauk Pauk                   | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 21 | Makanan Tambahan Gizi       | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 22 | Makanan Siap Saji           | -    | -    | -    | 0     | Paket  |     |
| 23 | Matras                      | -    | -    | -    | 0     | Lembar |     |



Sarana prasarana berupa Peralatan yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Dukungan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022**

| <b>No</b> | <b>Jenis Barang</b>                      | <b>Jumlah</b> | <b>Satuan</b> | <b>Keterangan</b>        |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------------------|
| 1         | Perahu Karet Uk. 10 Orang                | 7             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 2         | Perahu Lipat 3,85 m                      | 2             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 3         | Perahu Lipat 4,28 m                      | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 4         | Perahu Amphibi                           | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 5         | Perahu Polyethylene                      | 2             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 6         | Speedboat Polyethylene                   | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 7         | Tenda Posko                              | 2             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 8         | Tenda Pengungsi                          | 11            | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 9         | Tenda Keluarga                           | 28            | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 10        | Tenda Portable                           | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 11        | Tenda Sekolah                            | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 12        | Velbed                                   | 100           | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 13        | Terpal                                   | 289           | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 14        | Genset 1,2 KW                            | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 15        | Genset 10 KVA                            | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 16        | Genset 5,5                               | 2             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 17        | Genset Merk Yama EMG 1900                | 2             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 18        | Genset Merk Honda Tropic TP 3850 SP      | 2             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 19        | Mesin Perahu Karet Kap. 25 PK            | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 20        | Mesin Perahu Karet Kap. 40 PK            | 4             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 21        | Mesin Perahu 9,8 PK                      | 2             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 22        | Mesin Pompa Karhutla                     | 5             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 23        | Mesin Pompa Apung                        | 4             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 24        | Mesin Pompa Karhutla Tipe Ringan         | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 25        | Mesin Pompa Karhutla Tipe Utama          | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 26        | Mesin Pompa Karhutla (Fighter)           | 10            | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 27        | Nozzle                                   | 20            | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 28        | Fire Pump CET 6 PH                       | 2             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 29        | Fire Hose 1,5" x 30 m                    | 10            | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 30        | Fire Hose 2,5" x 30 m                    | 10            | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 31        | Fire Hose 1,5" x 20 m                    | 10            | Roll          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 32        | Selang Pemadam Staflo Hose               | 40            | Roll          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 33        | Pipa Cabang 1,5 Inch Merk Zeki           | 3             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 34        | Pompa Tekanan Tinggi dan Perlengkapannya | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 35        | Pompa Jinjing 2,5 HP                     | 10            | Roll          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 36        | Pompa Pemadam Sistim Busa                | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 37        | Pompa Pemadam Portable                   | 1             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 38        | Pompa Shibaura TF 745                    | 7             | Unit          | Gudang BPBD Prov. Sumsel |

|    |  |    |       |                          |
|----|--|----|-------|--------------------------|
| 39 | Pompa Shibaura TF 516  | 5  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 40 | Pompa Karhutla 2 HP  | 3  | Set   | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 41 | Pompa Karhutla 6 HP  | 1  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 42 | Pompa Air  | 5  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 43 | Aquafast Floating Pump   | 2  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 44 | Floating Pump Merk Kawasaki  | 1  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 45 | Fleksible Tank 5000 Galon  | 3  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 46 | Fleksible Tank 1500 Galon  | 3  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 47 | Fleksible Tank Kap. 1000 L   | 1  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 48 | Fleksible Tank Kap. 2000 L   | 1  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 49 | Tank Cylinder Cap 6,8 Liter  | 10 | Buah  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 50 | Water Treatment Portable   | 3  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 51 | Water Treatment Portable Mini  | 20 | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 52 | WTP  | 1  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 53 | Twister Series Dual Gallonage Nozzle 1,5" F 2060   | 5  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 54 | Twister Series Dual Gallonage Nozzle 2,5 F 2095  | 5  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 55 | Senter HID Search Light  | 3  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 56 | Light Tower Portable   | 1  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 57 | Solar Handle Lamp  | -  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 58 | Solar Cell (Lampu Penerangan)  | 1  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 59 | Gergaji Mesin (Chainsaw)   | 2  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 60 | RIG  | 2  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 61 | SSB  | 2  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 62 | Masker Respirator Merk 3 M series 6000 Type 6800 Full Face dan Filter Respirator Merk 3 M Type 6006 Multigas | 5  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 63 | Masker Tahan Api   | 10 | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 64 | Full Face Mask   | 10 | Buah  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 65 | Warepack   | -  | Stel  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 66 | Sepatu Safety  | -  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 67 | Fireboot   | 1  | Buah  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 68 | Baju dan Celana Tahan Api Type DuPont Nomex III A  | 2  | Pcs   | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 69 | Baju Celana Damkar   | 3  | Buah  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 70 | Fireman Helmet   | 5  | Buah  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 71 | Heat Resistance Glove  | 5  | Buah  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 72 | Back Plate & Harness   | 5  | Buah  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 73 | Toilet Portable  | 1  | Unit  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 74 | Flame Freze  | 5  | Liter | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 75 | Ansul Silvex Plus  | 5  | Drum  | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 76 | Pelampung 2019   | 9  | Pcs   | Gudang BPBD Prov. Sumsel |
| 77 | Pelampung 2020   | 20 | Pcs   | Gudang BPBD Prov. Sumsel |

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan kinerjanya didukung oleh kendaraan operasional dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Dukungan Kendaraan operasional BPBD**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

| No | Jenis Kendaraan                                   | No Polisi   | No Mesin       | No. Rangka        | Keterangan      |
|----|---|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya       | BG 1358 MZ  | G15A 1D 205418 | MHY GDN42AJ337886 | Pembelian /BPKB |
| 2  | Pick Up   | BG 8843 MZ  | WLAT1198461    | MNBBSBW40AW881833 | Pembelian /BPKB |
| 3  | Sepeda Motor                                      | BG 4919 PZ  |                | MH8CF48MAAJ-1949  | Pembelian /BPKB |
| 4  | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst) | BG 1975 MZ  | DCR8852        | MHKW3CA3JCK005754 | Pembelian /BPKB |
| 5  | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst) | BG 9457 MZ  | APHG1205911113 | MMM148MGOCH610699 | Pembelian /BPKB |
| 6  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)             | BG 7061 NZ  | J2700373       | KNCSHX71LF7901017 | Pembelian /BPKB |
| 7  | Pick Up   | B 9285 TTA  | 4D56C-P50515   | MHMLOPU39GK198605 | Hibah/BPKB      |
| 8  | Monilog (Mobil Logistik/ Personil)                | B 1103 PQQ  | E317218        | MHCTBR54FCK317218 | Hibah/BPKB      |
| 9  | Pick Up   | B 9285 TTA  | 4D56C-P50515   | MHMLOPU39GK198605 | Hibah/BPKB      |
| 10 | Sepeda Motor                                      | B 6607 TQC  | LX150CEPM2436  | MH4LX150CFJP28394 | Hibah/BPKB      |
| 11 | Sepeda Motor                                      | B 6608 TQC  | LX150CEPM5949  | MH4LX150CFJP28391 | Hibah/BPKB      |
| 12 | Sepeda Motor                                      | BG 4657 AAZ | LX150CEP28676  | MH4LCAKP19616     | Hibah/BPKB      |
| 13 | Sepeda Motor                                      | BG 4678 AAZ | LX150CEP28871  | MH4LX150AKP19612  | Hibah/BPKB      |
| 14 | Mobil Tinja                                       | B 9720 PQU  | B040073        | MHCNK71LYCJ040073 | Hibah/BPKB      |
| 15 | Mobil Tangki Air                                  | B 9200 PMA  | B049773        | MHCNKR71HDJ049773 | Hibah/BPKB      |
| 16 | Mobil Tangki Air                                  | B 9085 TMA  | B075795        | MHCNNR71HGJ075795 | Hibah/BPKB      |
| 17 | Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)           | B 9074 PQU  | B018996        | MHCNK71LYAJ018996 | Hibah/BPKB      |
| 18 | Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)           | B 9054 PQU  | 4B34TF80898    | MHMFE74P5AK035901 | Hibah/BPKB      |
| 19 | Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)           | BG 8965 MZ  | 4B56UCCC2367   | MMBJMKB40AD049043 | Hibah/BPKB      |
| 20 | Sepeda Motor                                      | BG 2989 AAZ | LX150CEWA3793  | MH4LX150GJJT65623 | Pembelian /BPKB |

|    |   |             |                    |                    |                 |
|----|---|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 21 | Sepeda Motor                                      | BG 2985 AAZ | LX150CEWA3768      | MH4LX150GJJT65816  | Pembelian /BPKB |
| 22 | Sepeda Motor                                      | BG 2990 AAZ | LX150CEWA2860      | MH4LX150GJJP65426  | Pembelian /BPKB |
| 23 | Sepeda Motor                                      | BG 2984 AAZ | LX150CEWA3798      | MH4LX150GJJP65729  | Pembelian /BPKB |
| 24 | Sepeda Motor                                      | BG 2991 AAZ | LX150CEWA3794      | MH4LX150GJJP637    | Pembelian /BPKB |
| 25 | Sepeda Motor                                      | BG 2983 AAZ | LX150CEWA3570      | MH4LX150GJJP65726  | Pembelian /BPKB |
| 26 | Sepeda Motor                                      | BG 2987 AAZ | LX150CEWA3775      | MH4LX150GJJP65814  | Pembelian /BPKB |
| 27 | Sepeda Motor                                      | BG 2986 AAZ | LX150CEWA3773      | MH4LX150GJJP65815  | Pembelian /BPKB |
| 28 | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst) | BG 42       | 2TR-A670013        | MHFGX8GS5K0506270  | Pembelian /BPKB |
| 29 | Mobil Komunikasi                                  | B 9588 PQU  | 4M40UAD1766        | MMBJNKB70CD061566  | Hibah/BPKB      |
| 30 | Sepeda Motor                                      | B 6322 PVX  | LX150CEPB8928      | MH4LX150CDKP77990  | Hibah/BPKB      |
| 31 | Sepeda Motor                                      | BG 4658 AAZ | LX150CEPB9167      | MH4LX150CDDKP77977 | Hibah/BPKB      |
| 32 | Mobil Ambulance                                   | BG 9019 MZ  | M040424            | MHCNK55EYBJ040424  | Hibah/BPKB      |
| 33 | Mobil Tangki Air                                  | BG 8682 MZ  | B106502            | MHCNMR71HKJ106502  | Pembelian /BPKB |
| 34 | Mobil Tangki Bahan Bakar                          | B 9226 TMA  |                    | MJEC1J643K5185219  | Hibah/BPKB      |
| 35 | Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)           | B 9357 TSC  | SK4505             | MPATFS86JJT005837  | Hibah/BPKB      |
| 36 | Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)           | B 9421 PSC  | 4D56UCDA3260       | MMBJMKB40CD014504  | Hibah/BPKB      |
| 37 | Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)           | B 9331 PQU  | B027553            | MHCNK71LYBJ027553  | Hibah/BPKB      |
| 38 | Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)           | BG 8765 MZ  | 2GD-0914116        | MR0KB8CD2L1125081  | Pembelian /BPKB |
| 39 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)            | BG 1363 IZ  | 1TRA938736         | MHFJW8EMOM2396247  | Pembelian /BPKB |
| 40 | Sepeda Motor                                      | B 5010 TWG  | MK<br>511112000908 | MK5111110NJ000726  | Hibah/BPKB      |

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Prov. Sumsel pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun anggaran 2022 BPBD Prov. Sumsel mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.31.798.806.066,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus

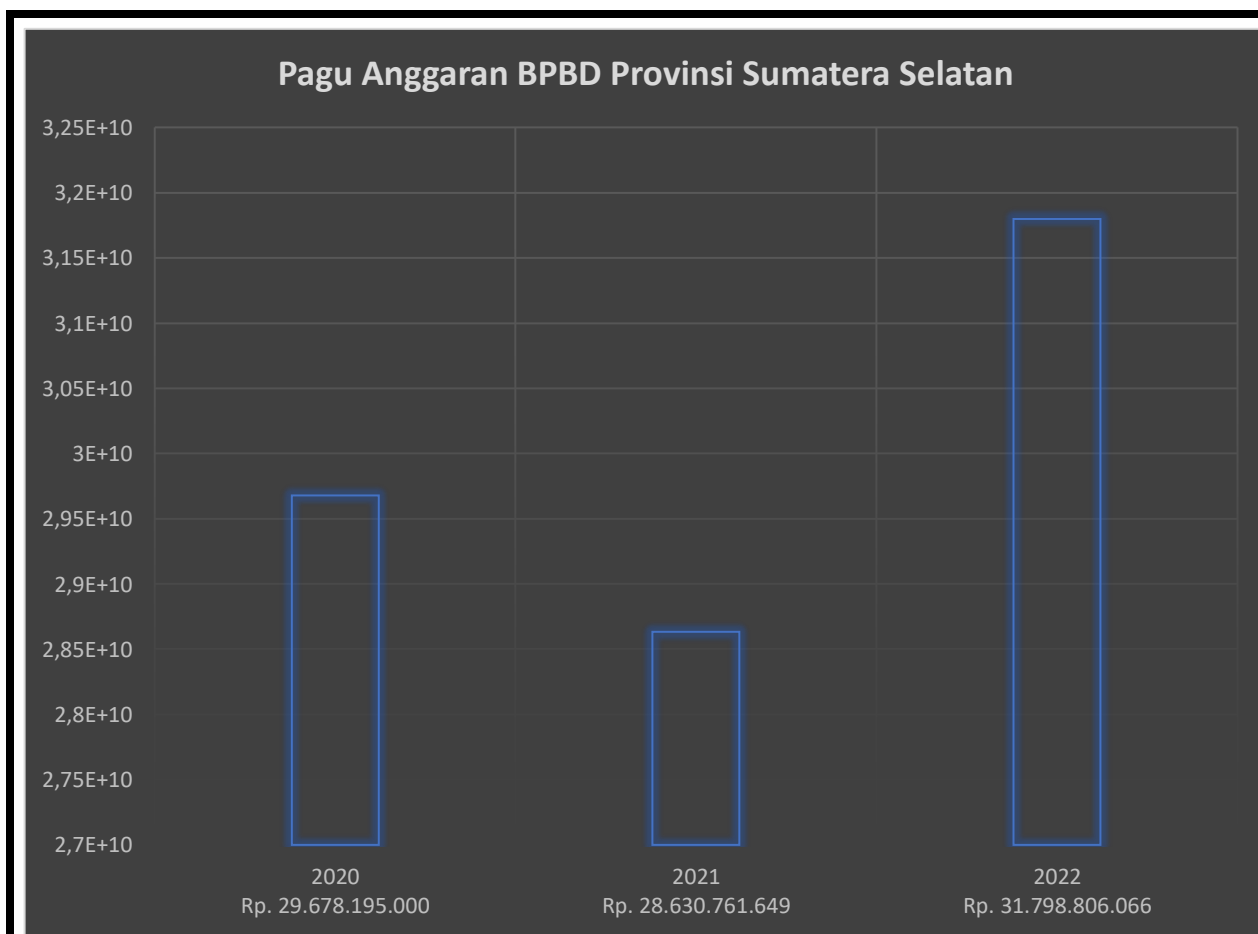
sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp.30.455.468.298,- (tiga puluh milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 95,78 % terdiri dari 2 program 11 kegiatan 30 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi Rp.27.192.172.632,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.065.188.234,- atau (95,86 %).
- Belanja Modal Rp.4.606.633.434,- dengan realisasi sebesar Rp.4.390.280.064,- atau (95,30 %).

| <b>LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN</b>                                  |   |                       |                |                     |                       |              |               |                      |                    |
|---|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|
| <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SUMSEL TAHUN ANGGARAN 2022</b> |   |                       |                |                     |                       |              |               |                      |                    |
| <b>BULAN DESEMBER 2022</b>  |   |                       |                |                     |                       |              |               |                      |                    |
| No  | Nama Kegiatan / Program   | Pengedaaan Dana       | Bobot (%)      | Target Keuangan (%) | Realisasi             |              |               | Tertimbang Fisik (%) | Sisa Pagu Anggaran |
|   |   |                       |                |                     | Keuangan              |              | Fisik         |                      |                    |
|   |   |                       |                |                     | Rp                    | %            | %             |                      |                    |
| 1   | 2   | 3                     | 4              | 5                   | 6                     | 7            | 8             | 9                    | 10                 |
|   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                |                       |                |                     |                       |              |               |                      |                    |
| <b>01</b>   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>     | <b>263.331.096,00</b> | <b>0,8281</b>  | <b>100,00</b>       | <b>248.687.558,00</b> | <b>94,44</b> | <b>100,00</b> | <b>0,83</b>          | <b>14.643.538</b>  |
| 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | 263.331.096           | 0,8281         | 100,00              | 248.687.558,00        | 94,44        | 100,00        | 0,83                 | 14.643.538         |
| <b>02</b>   | <b>Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>13.496.323.000</b> | <b>42,4429</b> | <b>100,00</b>       | <b>12.913.179.881</b> | <b>94,94</b> | <b>100,00</b> | <b>42,44</b>         | <b>683.143.119</b> |
| 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Belanja Pegawai)                         | 10.379.623.000        | 32,6415        | 100,00              | 9.729.002.881,00      | 93,73        | 100,00        | 32,64                | 650.620.119        |
| 02  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 3.096.700.000         | 9,7384         | 100,00              | 3.064.350.000,00      | 98,96        | 100,00        | 9,74                 | 32.350.000         |
| 07  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 20.000.000            | 0,0629         | 100,00              | 19.827.000,00         | 99,14        | 100,00        | 0,06                 | 173.000            |
| <b>05</b>   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | <b>465.700.150</b>    | <b>1,4645</b>  | <b>100,00</b>       | <b>422.418.000</b>    | <b>90,71</b> | <b>100,00</b> | <b>1,46</b>          | <b>43.282.150</b>  |
| 02  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                      | 200.000.000           | 0,6290         | 100,00              | 199.690.000,00        | 99,85        | 100,00        | 0,63                 | 310.000            |
| 09  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi               | 265.700.150           | 0,8356         | 100,00              | 222.728.000,00        | 83,83        | 100,00        | 0,84                 | 42.972.150         |
| <b>06</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>3.125.553.434</b>  | <b>9,8292</b>  | <b>100,00</b>       | <b>3.074.724.116</b>  | <b>98,37</b> | <b>100,00</b> | <b>9,83</b>          | <b>50.829.318</b>  |
| 01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 140.000.000           | 0,4403         | 100,00              | 139.927.500,00        | 99,95        | 100,00        | 0,44                 | 72.500             |
| 02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 1.508.553.434         | 4,7441         | 100,00              | 1.472.675.330,00      | 97,62        | 100,00        | 4,74                 | 35.878.104         |
| 03  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 90.000.000            | 0,2830         | 100,00              | 89.999.700,00         | 100,00       | 100,00        | 0,28                 | 300                |
| 05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 280.000.000           | 0,8805         | 100,00              | 279.824.700,00        | 99,94        | 100,00        | 0,88                 | 175.300            |
| 06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                    | 80.000.000            | 0,2516         | 100,00              | 79.920.000,00         | 99,90        | 100,00        | 0,25                 | 80.000             |
| 08  | Fasilitas Kunjungan Tamu  | 220.000.000           | 0,6918         | 100,00              | 209.353.760,00        | 95,16        | 100,00        | 0,69                 | 10.646.240         |
| 09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | 807.000.000           | 2,5378         | 100,00              | 803.023.126,00        | 99,51        | 100,00        | 2,54                 | 3.976.874          |

|           |   |                      |                |               |                      |              |               |              |                    |
|-----------|---|----------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|
| <b>08</b> | <b>Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>575.000.000</b>   | <b>1,8082</b>  | <b>100,00</b> | <b>480.782.097</b>   | <b>83,61</b> | <b>100,00</b> | <b>1,81</b>  | <b>94.217.903</b>  |
| 01        | Pengediaan Jasa Surat Mengurat  | 90.000.000           | 0,2830         | 100,00        | 79.966.000,00        | 88,85        | 100,00        | 0,28         | 10.034.000         |
| 02        | Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 463.600.000          | 1,4768         | 100,00        | 385.416.097,00       | 82,07        | 100,00        | 1,48         | 84.183.903         |
| 04        | Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 15.400.000           | 0,0484         | 100,00        | 15.400.000,00        | 100,00       | 100,00        | 0,05         | -                  |
| <b>09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>4.403.329.482</b> | <b>13,8475</b> | <b>100,00</b> | <b>4.208.556.645</b> | <b>95,58</b> | <b>100,00</b> | <b>13,85</b> | <b>194.772.837</b> |
| 02        | Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.113.329.482        | 3,5012         | 100,00        | 1.081.975.245,00     | 97,18        | 100,00        | 3,50         | 31.354.237         |
| 06        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 290.000.000          | 0,9120         | 100,00        | 289.915.000,00       | 99,97        | 100,00        | 0,91         | 85.000             |
| 09        | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 3.000.000.000        | 9,4343         | 100,00        | 2.836.666.400,00     | 94,56        | 100,00        | 9,43         | 163.333.600        |

| <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b> |  |                       |                |               |                          |              |               |               |                      |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>01</b>                             | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>  | <b>829.773.434</b>    | <b>2,6094</b>  | <b>100,00</b> | <b>818.670.787</b>       | <b>98,66</b> | <b>100,00</b> | <b>2,61</b>   | <b>11.102.647</b>    |
| 01                                    | Pengusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi  | 50.000.000            | 0,1572         | 100,00        | 46.221.081,00            | 92,44        | 100,00        | 0,16          | 3.778.919            |
| 02                                    | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)    | 779.773.434           | 2,4522         | 100,00        | 772.449.706,00           | 99,06        | 100,00        | 2,45          | 7.323.728            |
| <b>02</b>                             | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                     | <b>1.992.990.000</b>  | <b>6,2675</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.885.319.762</b>     | <b>94,60</b> | <b>100,00</b> | <b>6,27</b>   | <b>107.670.238</b>   |
| 02                                    | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana  | 399.300.000           | 1,2557         | 100,00        | 356.703.900,00           | 89,33        | 100,00        | 1,26          | 42.596.100           |
| 04                                    | Pengediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana  | 404.400.000           | 1,2717         | 100,00        | 386.304.000,00           | 95,67        | 100,00        | 1,27          | 17.496.000           |
| 06                                    | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                             | 699.730.000           | 2,2005         | 100,00        | 687.426.500,00           | 98,24        | 100,00        | 2,20          | 12.303.500           |
| 07                                    | Penanganan Pascabencana Provinsi   | 400.000.000           | 1,2579         | 100,00        | 370.245.362,00           | 92,56        | 100,00        | 1,26          | 29.754.638           |
| 09                                    | Pengusunan Rencana Kontijensi  | 89.560.000            | 0,2816         | 100,00        | 84.040.000,00            | 93,84        | 100,00        | 0,28          | 5.520.000            |
| <b>03</b>                             | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>  | <b>2.206.805.470</b>  | <b>6,9399</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.139.534.884</b>     | <b>96,95</b> | <b>100,00</b> | <b>6,94</b>   | <b>67.270.586</b>    |
| 02                                    | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana  | 1.050.000.000         | 3,3020         | 100,00        | 997.127.184,00           | 94,96        | 100,00        | 3,30          | 52.872.816           |
| 04                                    | Pengediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                       | 1.156.805.470         | 27,9422        | 100,00        | 1.142.407.700,00         | 98,76        | 100,00        | 27,94         | 14.397.770           |
| <b>04</b>                             | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>  | <b>4.440.000.000</b>  | <b>13,9628</b> | <b>100,00</b> | <b>4.363.594.568</b>     | <b>98,28</b> | <b>100,00</b> | <b>13,96</b>  | <b>76.405.432</b>    |
| 03                                    | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                 | 4.140.000.000         | 13,0194        | 100,00        | 4.071.104.152,00         | 98,34        | 100,00        | 13,02         | 68.895.848           |
| 05                                    | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah provinsi | 300.000.000           | 0,8434         | 100,00        | 292.490.416,00           | 97,50        | 81,00         | 0,76          | 7.509.584            |
| <b>J U M L A H</b>                    |  | <b>31.798.806.066</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>30.455.468.298,00</b> | <b>95,78</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.343.337.768</b> |



## 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Prov. Sumsel tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPBD Prov. Sumsel, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran

utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

### **LAMPIRAN**



## BAB 2

# Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2022*
4. *Instrumen Pendukung*

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2023, BPBD Prov. Sumsel menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPBD Prov. Sumsel Tahun 2019-2023. Renstra BPBD Prov. Sumsel merupakan manifestasi komitmen BPBD Prov. Sumsel dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Prov. Sumsel yang tertuang dalam RPJMD Prov. Sumsel Tahun 2019-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra BPBD Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

RPJMD Pemerintah Daerah Prov. Sumsel merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Prov. Sumsel tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sumsel Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BPBD Prov. Sumsel yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra BPBD Prov. Sumsel Tahun 2019-2023 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Prov. Sumsel tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

### **2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi Misi Gubernur Prov. Sumsel yang dituangkan dalam RPJMD Prov. Sumsel berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2013-2018) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2019-2023). Visi Misi Gubernur Prov. Sumsel pada perencanaan periode 2019-2023 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Prov. Sumsel memiliki visi misi “**SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**”. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk periode 2019-

2023. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Prov. Sumsel menetapkan misi, yakni:

- 1) Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

**Tabel 2.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan**

| Visi : <b>SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA</b> |   |   |  |   |
|---------------------------------------|---|---|--|---|
| No                                    | Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan   | Permasalahan Pelayanan BPBD Prov. Sumsel          | Faktor   |   |
|                                       |   |   | Penghambat   | Pendorong   |
| (1)                                   | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   |
| 1                                     | 1) Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan | Masih tingginya Risiko Bencana di Provinsi Sumsel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya Kapasitas dalam penanggulangan bencana</li> <li>• Tingginya tingkat kerentanan bencana</li> <li>• Belum optimalnya interinternalisasi perencanaan bencana kedalam rencana penanggulangan bencana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan kebijakan Pusat dalam penanganan Bencana</li> <li>• Komitmen Gubernur Sumatera Selatan yang tinggi terhadap penanganan Bencana dalam semua tahapan</li> <li>• Dukungan kebijakan dan pendanaan dalam</li> </ul> |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   | baik di perkotaan maupun di perdesaan.   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya penerapan SPM sub-urusan bencana</li> </ul>   | penanganan Bencana di Provinsi Sumatera Selatan   |
| 2 | 2) Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.   | Masih rendahnya kualitas SDM penanggulangan benca | Belum seluruhnya aparat BPBD mendapatkan BIMTEK dan Pelatihan terkait kebencanaan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap tahun sudah dianggarkan BIMTEK dan Pelatihan terkait kebencanaan</li> <li>• Adanya penyelenggaraan BIMTEK dan Pelatihan terkait kebencanaan di BNPB</li> </ul>  |
| 3 | 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparat pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.                               | Rendahnya Pengawasan internal                     | Belum menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsi   | Adanya pengawasan dari APIP   |
| 4 | 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan | Masih tingginya Risiko Bencana di Provinsi Sumsel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya Kapasitas dalam penanggulangan bencana</li> <li>• Tingginya tingkat kerentanan bencana</li> <li>• Belum optimalnya interinternalisasi perencanaan bencana kedalam rencana penanggulangan bencana</li> <li>• Rendahnya penerapan SPM sub-urusan bencana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan kebijakan Pusat dalam penanganan Bencana</li> <li>• Komitmen Gubernur Sumatera Selatan yang tinggi terhadap penanganan Bencana dalam semua tahapan</li> <li>• Dukungan kebijakan dan pendanaan dalam penanganan Bencana di Provinsi Sumatera Selatan</li> </ul> |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   | daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.  |  |   |  |
| 5 | 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. | Budaya masyarakat yang cenderung meningkatkan kerentanan bencana | Pergeseran nilai budaya <i>local wisdom</i> (Kearifan lokal) dalam pengelolaan lingkungan |  |

### 2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah BPBD Prov. Sumsel selama 5 tahun anggaran adalah “**BPBD Tangguh Sumsel Maju**” Ketangguhan adalah hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari dan meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana adalah pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

Dalam mewujudkan Visi BPBD Provinsi Sumatera Selatan tersebut, secara sistematis dan bertahap menuntut adanya kesiapan serta kemampuan dalam penanggulangan bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan daerah yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk itu, Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatandirumuskan sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Sumsel dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
2. Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang tanggap, tangkas, tangguh ( 3T ) ;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi dan berdimensi dengan pengurangan resiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Membangun sistem informasi penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Upaya pencapaian Misi pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BPBD Provinsi Sumatera Selatan agar dapat sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

#### **2.4 Strategi dan Arah kebijakan**

Adapun Strategi yang akan ditempuh sehubungan dalam perwujudan visi dan misi BPBD dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan Mengembangkan Pengelolaan Risiko Bencana dengan Memperhatikan Tata Ruang dan Penataan Kawasan;
- 2) Meningkatkan Tata Kelola Penanganan Bencana pada Tahap Pencegahan, Penanganan Pra Bencana, dan Penanganan Pasca Bencana;
- 3) Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana.

Sehubungan dengan strategi yang telah ditetapkan di atas maka kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana sesuai dengan Proyeksi Risiko dengan Memperhatikan Tata Ruang dan Penataan Kawasan;
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanganan Bencana setiap Tahapan Manajemen Bencana;
- 3) Penguatan Kesadaran Masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana dan Peningkatan Kerjasama dengan Berbagai Stakeholder.

Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

**Tujuan :**

Tujuan strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang 2019-2023, yaitu :

**“ Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumsel”**

Sedangkan sasaran BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2019-2023, meliputi :

**Sasaran :**

Sasaran strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023) adalah:

1. Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana kedalam Rencana Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana;
3. Menurunnya Tingkat Kerentanan Bencana.

**Indikator Kinerja:**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2019 – 2023 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, adalah:

1. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel;
2. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal;
3. Persentase Daerah Rawan Bencana yang Mempunyai Pelayanan informasi;
4. Persentase Penanganan Pra Bencana;
5. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.2 sebagaimana berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

| NO. | TUJUAN                           | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE - |           |           |           |           |
|-----|----------------------------------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                  |   |  | 2019                                   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| (1) | (2)                              | (3)   | (4)  | (5)                                    | (6)       | (7)       | (8)       | (9)       |
| 1   | Menurunkan Risiko Bencana Sumsel | Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana kedalam Rencana Pembangunan Daerah | Penurunan Indek Risiko Bencana Provinsi Sumsel                                 | 133,67                                 | 125,65    | 137,05    | 137,00    | 136,95    |
|     |                                  |   | Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|     |                                  | Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana                                 | Persentase Daerah Rawan Bencana yang Mempunyai Pelayanan Informasi             | 100%                                   | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|     |                                  |   | Persentase Penanganan Pra Bencana  | 100%                                   | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|     |                                  | Menurunnya Tingkat Kerentanan Bencana   | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana                                  | 100 %                                  | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |

## Bab 3

# Akuntabilitas Kinerja

### MISI KEEMPAT

#### Untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dengan Sasaran:

- **Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)**

Untuk mewujudkan misi keempat telah ditetapkan sasaran strategis. Dalam tahun 2021 telah dilaksanakan upaya pencapaian sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

### 3.1 Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

Manajemen penanggulangan bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat. Ada beberapa indikator kinerja sesuai RPJMD yaitu:

1. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal
3. Persentase Daerah Rawan Bencana yang Mempunyai Pelayanan Informasi
4. Persentase Penanganan Pra Bencana
5. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana

#### 1. PENURUNAN NILAI INDEKS RISIKO BENCANA PROVINSI SUMSEL

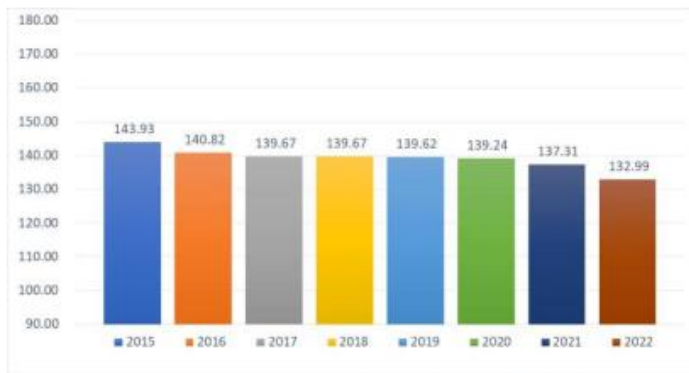
| Indikator Kinerja Utama                            | Capaian Tahun 2022 |        |           |        |
|--|--------------------|--------|-----------|--------|
|  | Satuan             | Target | Realisasi | %      |
| Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Prov. Sumsel | %                  | 137,00 | 132,99    | 103,01 |

Secara Administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintahan Kota. Secara Geografis wilayah Provinsi Sumatera Selatan berbatasan langsung dengan Patahan Sumatera atau Patahan Semangko, yaitu patahan yang memotong Pulau Sumatera dari ujung Utara Barat di Aceh hingga ke Selatan di Lampung. Zona sesar ini membentang sepanjang sisi Barat Pulau Sumatera yang tentu saja sering menimbulkan bahaya *seismic* karena sesar ini melewati Kawasan yang padat penduduk



disekitar zona sesar. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ancaman gempa bumi.

Selain itu, kondisi topografi yang terdiri dari dataran rendah, gambut, sungai besar, perbukitan membuat Provinsi Sumatera Selatan memiliki ancaman bencana yang bervariasi. Adapun kejadian bencana yang paling besar terjadi pada tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan yakni bencana kebakaran Hutan dan Lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Sumatera Selatan memiliki Indeks Risiko



▲ Grafik nilai indeks risiko Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

**ANCAMAN BENCANA:**

Gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan.

**NILAI IRB 2022:**

**132.99**  
(SEDANG)

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022

| NO | KABUPATEN/KOTA             | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | KELAS RISIKO 2022 |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 1  | EMPAT LAWANG               | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 153.07 | 154.31 | TINGGI            |
| 2  | MUARA ENIM                 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 152.86 | TINGGI            |
| 3  | MUSI RAWAS                 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 145.27 | 146.94 | TINGGI            |
| 4  | OGAN KOMERING ILIR         | 153.20 | 153.20 | 153.20 | 153.20 | 153.20 | 153.20 | 153.20 | 146.36 | TINGGI            |
| 5  | OGAN KOMERING ULU          | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 145.51 | TINGGI            |
| 6  | MUSI RAWAS UTARA           | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 154.15 | 142.61 | SEDANG            |
| 7  | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 142.57 | SEDANG            |
| 8  | KOTA PRABUMULIH            | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | SEDANG            |
| 9  | KOTA PALEMBANG             | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | SEDANG            |
| 10 | OGAN KOMERING ULU TIMUR    | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | SEDANG            |
| 11 | BANYUASIN                  | 156.40 | 156.40 | 136.95 | 136.95 | 136.07 | 141.43 | 137.81 | 130.11 | SEDANG            |
| 12 | KOTA PAGAR ALAM            | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | SEDANG            |
| 13 | KOTA LUBUKLINGGAU          | 124.80 | 124.80 | 124.80 | 124.80 | 124.80 | 124.80 | 124.80 | 124.80 | SEDANG            |
| 14 | MUSI BANYUASIN             | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 125.53 | 117.86 | SEDANG            |
| 15 | OGAN ILIR                  | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 120.56 | 116.43 | 117.60 | SEDANG            |
| 16 | LAHAT                      | 162.00 | 109.07 | 109.07 | 109.07 | 109.07 | 109.07 | 116.55 | 111.56 | SEDANG            |
| 17 | OGAN KOMERING ULU SELATAN  | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 120.26 | 106.15 | SEDANG            |

\*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

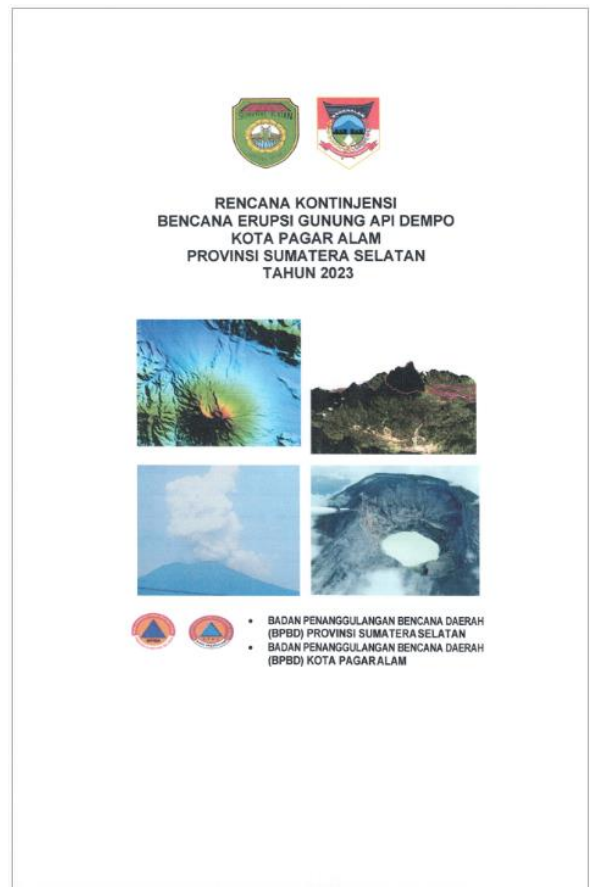
**2. PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN KEBENCANAAN SAMPAI DENGAN DINYATAKAN SAH/LEGAL**

| Indikator Kinerja Utama  | Capaian Tahun 2022 |        |           |    |
|--|--------------------|--------|-----------|----|
|  | Satuan             | Target | Realisasi | %  |
| Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal | %                  | 100    | 66        | 66 |

Dari target 6 (enam) dokumen kebencanaan yang akan disusun selama Tahun 2019 – 2023 telah diselesaikan sebanyak 4 (empat) dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal, yaitu dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah disusun pada Tahun 2022, Rencana Kontijensi (Rekon) Karhutla Tahun 2021, Kajian Risiko Bencana Tahun 2022, dan Rencana Kontijensi (Rekon) Gunung Api Dempo Tahun 2022.

| No | Penyelesaian Dokumen                        | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|----|---|------------|------------|
| 1. | Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)        | √          |            |
| 2. | Rencana Kontijensi (Rekon) Karhutla         | √          |            |
| 3. | Kajian Risiko Bencana                       | √          |            |
| 4. | Rencana Kontijensi (Rekon) Gunung Api Dempo |            | √          |





Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana kontinjensi disusun dalam tingkat yang dibutuhkan. Perencanaan kontinjensi merupakan prasyarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat tersebut. Perencanaan kontinjensi akan membangun kapasitas sebuah organisasi dan harus menjadi dasar bagi rencana operasi siaga darurat dan tanggap darurat. Dokumen rencana kontinjensi ini disusun bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana gunung api dempo pada saat siaga darurat dan tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengambil peran dalam penyusunan rencana kontinjensi. Anggaran Penyusunan Rencana Kontinjensi adalah Rp.89.560.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 84.040.000,- atau 93,84% dan realisasi fisik 100%. Dengan target kinerja adalah 1 dokumen.

### 3. PERSENTASE DAERAH RAWAN BENCANA YANG MEMPUNYAI PELAYANAN INFORMASI

| Indikator Kinerja Utama  | Capaian Tahun 2022 |        |           |     |
|--|--------------------|--------|-----------|-----|
|  | Satuan             | Target | Realisasi | %   |
| Persentase Daerah Rawan Bencana yang Mempunyai Pelayanan Informasi | %                  | 100    | 100       | 100 |

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Provinsi (Per jenis Bencana) adalah salah satu kegiatan dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 ini yang di laksanakan untuk daerah - daerah rawan bencana , adapun tujuan dari KIE yaitu mengurangi risiko korban jiwa akibat bencana, meminimalisir korban harta benda bagi masyarakat yang berdampingan dengan bencana, terdeteksinya ancaman bencana lebih awal dengan dilakukannya pemantauan secara kontinyu oleh tim siaga bencana Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota menjadi tangguh dalam menghadapi bencana dan terbangunnya komunikasi yang sinergis antara BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi Sumsel. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KEI) dilaksanakan untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terutama daerah rawan bencana, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana dan membentuk tim siaga bencana desa yang mempunyai daya kapasitas terhadap pemahaman bencana. Anggaran Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) adalah Rp. 779.773.434,- dengan realisasi keuangan Rp. 772.449.706,- atau 99,06% dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan ini adalah TV, media cetak, elektronik, papan informasi. BPBD Prov. Sumsel tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana provinsi (per jenis bencana) berjalan dengan baik dan lancar.



#### 4. PERSENTASE PENANGANAN PRA BENCANA

| Indikator Kinerja Utama           | Capaian Tahun 2022 |        |           |     |
|-----------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----|
|                                   | Satuan             | Target | Realisasi | %   |
| Persentase Penanganan Pra Bencana | %                  | 100    | 100       | 100 |



Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana adalah upaya membangun masyarakat untuk mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana secara mandiri. Kemampuan tersebut diharapkan akan mengurangi dampak dan risiko bencana. Tujuan dari Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar dan teori mitigasi bencana, meningkatkan kemampuan dalam melakukan perencanaan mitigasi bencana (struktural dan non struktural), memahami bahaya dan kerusakan akibat bencana, memahami mekanisme kerusakan, serta memahami cara-cara dan tindakan mitigasi bencana. Anggaran Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana adalah Rp.399.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 356.703.900,- atau 89,33% dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan adalah pelatihan. BPBD Prov. Sumsel tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana berjalan dengan baik dan lancar.





Bantuan logistik untuk korban bencana pada saat status keadaan darurat harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas. Pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan bantuan logistik secara cermat agar dapat segera mengatasi permasalahan korban bencana. 1.156.805.470,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.142.407.700,- atau 98,76% dan realisasi fisik 100%. Dengan target kinerja adalah 6000 paket. BPBD Prov. Sumsel tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana berjalan dengan baik dan lancar.



Operasi Udara melaksanakan tugas untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan operasi pemadaman udara melalui helikopter atau pesawat dan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca/Hujan Buatan. Untuk pelaksanaan operasi udara siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 di Sumatera Selatan yang berlangsung secara bertahap. Anggaran Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana adalah Rp. 4.140.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.071.104.152,- atau 98,34% dan realisasi fisik 100%. Dengan target kinerja adalah 46 jam terbang. BPBD Prov. Sumsel tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana berjalan dengan baik dan lancar.

## BAB 4

### Penutup

#### **Bab 5 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan Program dan kegiatan di BPBD Prov. Sumsel pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke-4 dari Rencana Strategis BPBD Prov. Sumsel Tahun 2019-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

#### **4.1 Langkah untuk Pencapaian Target Kinerja, Dukungan, dan Saran serta Evaluasi**

##### **I. Langkah – langkah untuk pencapaian target hingga tahun 2023 sebagai berikut :**

1. Harus membuat kajian dan pemetaan risiko bencana seluruh jenis bencana di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan akan lebih efektif dan efisien, apabila terfokus pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik dari personil, peralatan dan pemadaman.
3. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir harus di maksimalkan mengingat kejadian bencana banjir mengalami peningkatan di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Empat Lawang terjadi di Pasemah Air Keruh yang menyebabkan jembatan putus dan beberapa rumah mengalami rusak berat.
4. Perlu dilakukan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di dekat kawasan rentan terbakar dan masyarakat yang memanfaatkan hutan dan lahan dengan cara membakar.
5. Membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan.
6. Melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap si pembakar.
7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah Setempat untuk melakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing.
8. Meningkatkan fungsi dan peran pemerintah dari tingkat provinsi sampai dengan kepala desa untuk melakukan upaya bersama pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.



9. Mengembangkan sistem peringatan dini dan deteksi dini yang diikuti dengan tindakan di lapangan.
10. Melakukan penjagaan di tingkat lapangan oleh aparat secara terpadu baik aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk upaya pencegahan.
11. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kampanye penyadaran publik.
12. Mengatur tata kelola lahan gambut.
13. Meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengaktifkan posko pemantauan dan menyiagakan satuan tugas pemadaman dan peralatan.

## **II. Dukungan**

Dukungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa kebijakan dan pendanaan terhadap Program Kegiatan Penanggulangan Bencana cukup besar. Hal tersebut merupakan energi yang kuat untuk pelaksanaan arah kebijakan dalam menggerakkan semua unsur terkait dari OPD Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan maupun instansi vertikal dan komponen masyarakat lainnya yang ikut serta dan berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan di Sumatera Selatan. Dukungan dunia usaha, dunia Pendidikan, swasta, serta TNI dan Polri, dengan seluruh kekuatannya termasuk di wilayah terkecil di desa - desa rawan bencana juga merupakan elemen yang penting karena secara psikologis dapat membantu wilayah yang terkecil dalam koordinasi penanggulangan bencana.

Kesadaran masyarakat untuk melakukan tanggap bencana di wilayah mereka sendiri sangatlah penting, mengingat risiko bencana berada di wilayah mereka sendiri. Jika terjadi bencana seharusnya mereka sudah siap untuk melakukan penyelamatan bagi keluarga mereka sendiri, baru kemudian pihak luar datang untuk melakukan pertolongan. Peran Pemerintah dalam hal ini BPBD Kab/Kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa-Desa harus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana tersebut.

## **III. Saran dan Evaluasi**

Adapun saran dan evaluasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana.
2. Melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan.
3. Melakukan pengkajian risiko dan perencanaan terpadu.
4. Membuat system informasi, diklat dan logistik.
5. Melakukan penanganan tematik Kawasan rawan bencana.
6. Melakukan peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.

7. Melakukan penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
8. Melakukan pengembangan sistem pemulihan bencana.

Palembang, Februari 2023  
Kepala Pelaksana,  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Iriansyah, S.Sos., SKM., M.Kes.  
NIP. 196310161985011001